

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian (Fahira, 2020) tentang “Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.12 Tentang Laporan Operasional pada Inspektorat Kabupaten Jayapura”. Penelitian ini menggunakan metode komparatif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyajian Laporan Operasional yang ada pada Inspektorat Kabupaten Jayapura telah sesuai atau tidak sesuai dengan PSAP No. 12 Tentang Laporan Operasional. Jenis data yang dikumpulkan pada penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian Laporan Operasioal pada Inspektorat Kabupaten Jayapura secara keseluruhan telah sesuai dengan PSAP No. 12 Tentang Laporan Operasional.

Penelitian (Sembiring, 2020) tentang “Analisis Pengakuan Pendapatan Rawat Inap Dan Rawat Jalan Pada Rumah Sakit Bina Kasih Pekanbaru”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan Teknik pengumpulan data wawancara dan observasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan pengakuan pendapatan rawat inap dan rawat jalan Rumah Sakit Bina Kasih Pekanbaru menggunakan metode accrual basis yaitu pendapatan diakui pada saat terjadi transaksi, meskipun pihak rumah sakit belum menerima pembayaran dalam bentuk uang atau kas. Hasil penelitian tentang pencatatan pendapatan terdapat kesalahan yaitu seharusnya piutang yang tidak tertagih dicatat sebagai beban operasional bukan sebagai pendapatan.

Penelitian (Mufti, 2021) tentang “Pengakuan Pendapatan dan Biaya Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan pada Rumah Sakit Umum Pusat Wahidin Sudirohusodo di Makassar”. Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dan metode analisis komparatif dengan melakukan perhitungan dengan data-data yang tercatat dalam laporan posisi keuangan dan laporan aktivitas, bahwa

pengakuan pendapatan dan biaya secara khusus telah memiliki standar yaitu pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK No.23.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Hal ini dapat dilihat dari Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo dalam prakteknya menerapkan sistem akuntansi dalam rangka pelaporan keuangan. Laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan BLU-RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

Penelitian (Purta et al., 2022) tentang “Analisis pengakuan, pengukuran dan Pengungkapan Pendapatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram”. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa RSUD Kota Mataram dalam mengakui, mengukur dan mengungkapkan pendapatannya, baik LRA maupun LO, sudah sesuai dengan PSAP 13.

Penelitian (Arifah, 2022) tentang “Perlakuan Akuntansi Atas Pendapatan dari Pasien Umum Maupun Pasien dari Keluarga Semen Indonesia pada RS Semen Gresik”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif komparatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Rumah Sakit Semen Gresik mendefinisikan pendapatan sebagai total arus masuk keuntungan ekonomi yang dapat didistribusikan pada layanan kesehatan. Sebagai perusahaan asuransi, pendapatan pasien dibagi menjadi dua kategori yaitu pasien umum dan pasien keluarga. Praktik akuntansi pendapatan secara umum di RS Semen Gresik menganut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 23.

Untuk penelitian terdahulu ini sangat berguna bagi peneliti untuk mengambil atau menjelaskan lebih lanjut dari sebelumnya yang diteliti. Beberapa penelitian yang dapat peneliti gunakan untuk pedoman penelitian yang diantaranya terdapat persamaan dan perbedaan pada penelitian. Untuk persamaan dari

penelitian ini yaitu berfokus pada pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pendapatan. Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian ini dilakukan di RSUD Kabupaten Kediri, serta penelitian ini menggunakan data yang lebih baru dan relevan yaitu laporan keuangan RSUD Kabupaten Kediri tahun 2023.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah arus masuk aktiva dan atau penyelesaian kewajiban akibat penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa atau kegiatan menghasilkan laba lainnya yang membentuk operasi utama atau inti perusahaan yang berkelanjutan selama suatu periode. Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa akan dikenal dengan sebutan berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fee*) bunga, dividen royalti dan sewa. Pendapatan adalah arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul atas aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Menurut (Widjaya, 2003) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah serta merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan usaha suatu daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah guna membiayai kebutuhan pembangunan sendiri untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah wilayahnya. Untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka pemerintah daerah diberi kesempatan untuk menggali sumber-sumber keuangan yang ada di daerah.

2.2.2 Kriteria Pendapatan

Menurut (Martani dkk, 2018) ada tiga perbedaan kriteria yang dapat digunakan dalam menentukan saat yang tepat untuk mengakui pendapatan, yaitu:

a. Penjualan Barang

Pendapatan dari penjualan barang harus diakui apabila seluruh kondisi berikut dipenuhi :

- 1) Entitas telah memindahkan resiko secara signifikan dan telah memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli.
- 2) Entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaannya yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual.
- 3) Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal.

b. Penjualan Jasa

Jika hasil yang terkait dengan penjualan jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca.

Hasil transaksi dapat diestimasi dengan andal, jika seluruh kondisi berikut ini dipenuhi oleh:

1. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal.
2. Kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut dapat diperoleh entitas.
3. Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal.

c. Pendapatan bunga, Royalti, Dividen

Pendapatan yang timbul dari pengguna aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dividen diakui sebagai berikut:

1. Pengakuan pendapatan bunga mengikuti konsep akuntansi akrual. Pendapatan bunga diakui menggunakan metode suku bunga efektif.
2. Pendapatan royalti diterima dari pengguna aset perusahaan seperti paten, hak cipta musik dan film, akan diakui berdasarkan garis lurus selama periode

waktu perjanjian royalti.

3. Pendapatan dividen diakui ketika muncul hak pemegang saham untuk menerima pembayaran dividen, yaitu tanggal pengumuman dividen.

2.2.3 Sumber Pendapatan Rumah Sakit

Pendapatan dapat dibedakan menjadi dua yaitu pendapatan operasional dan non-operasional

1. Pendapatan Operasional

Pendapatan operasional merupakan pendapatan dari layanan jasa kepada masyarakat atau pasien, dalam satu periode yang merupakan kegiatan utama rumah sakit. Pelayanan jasa di rumah sakit dibedakan menjadi:

a. Pelayanan rawat jalan

Pelayanan yang diberikan kepada pasien yang masuk rumah sakit untuk kebutuhan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa harus tinggal diruang rawat inap.

b. Pelayanan Rawat Inap

Perawatan rawat inap adalah perawatan yang tinggal di rumah sakit untuk jangka waktu tertentu. Perawatan rawat inap adalah pelayanan Kesehatan perorangan mencakup observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di ruang rawat inap rumah sakit.

c. Pelayanan Gawat Darurat

Instalasi gawat darurat adalah satu pelayanan utama yang diberikan di rumah sakit. Pendapatan gawat darurat adalah bagian dari pelayanan kedokteran yang dibutuhkan oleh pasien dalam waktu segera. Pelayanan di IGD adalah pelayanan 24 jam.

d. Pelayanan Penunjang Spesifik

Pelayanan penunjang medis adalah pelayanan penunjang untuk mendukung pelayanan di rumah sakit.

e. Pelayanan Farmasi dan lain-lain

Pelayanan kefarmasian adalah proses kolaborasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan masalah obat-obatan dan Kesehatan.

2. Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional adalah pendapatan yang sumbernya dari luar kegiatan utama rumah sakit, atau bisa disebut juga pendapatan lain-lain. Pendapatan ini bisanya lebih kecil daripada pendapatan operasional. Pendapatan non operasional adalah pendapatan yang didapatkan dari kegiatan sampingan atau bukan kegiatan utama rumah sakit yang bersifat tidak tetap atau rutin. Pendapatan rumah sakit antara lain adalah: (Swardjono, 2015)

- a. Pendapatan Sewa merupakan pendapatan karena rumah sakit menyewakan asetnya kepada pihak-pihaklain, misalnya sewa bangunan dan ambulans.
- b. Pendapatan bagi hasil, pendapatan yang diperoleh rumah sakit dari sistem bagi hasil dengan pihak-pihak tertentu misalnya pendapatan dari retribusi parkir rumah sakit, dan kantin rumah sakit.

2.2.4 Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan

1. Pengakuan Pendapatan

Pengakuan Pendapatan atas transaksi penjualan jasa adalah sebagai berikut: bila suatu transaksi yang meliputi penjualan jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan sehubungan transaksi harus diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca (Martani dkk, 2018).

Ada dua metode yang digunakan dalam perlakuan pengakuan dari pendapatan yaitu :

1. *Accrual Basis*, yaitu pendapatan diakui pada saat periode terjadinya transaksi pendapatan. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian walaupun kas belum diterima.
2. *Cash Basis*, yaitu pendapatan hanya dapat diakui dan diperhitungkan berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas. Dengan dasar ini, maka penjualan barang atau jasa hanya dapat diperhitungkan pada saat tagihan diterima.

2. Pengukuran Pendapatan

Menurut (Martani dkk, 2018) menyatakan bahwa pengukuran adalah pendapatan itu dapat ditentukan besarnya dengan wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima.

Menurut (Belkoui, 2006) pengukuran memiliki arti pemberian angka-angka

pada objek kejadian-kejadian menurut aturan tertentu tanpa melihat batasan-batasan tersebut, secara tradisional pengukuran dalam akuntansi akan melibatkan pemberian nilai-nilai angka kepada objek, kejadian atau atributnya dengan suatu cara tertentu, sehingga dapat memastikan pelaksanaan atau disagresi data dengan mudah.

Menurut (skousen dan stice akbar, 2009) ada lima dasar pengukuran yang biasanya digunakan dalam prakteknya yaitu:

- a. *Cost* historis yaitu harga tunai ekuivalen yang dipertukarkan untuk barang atau jasa pada tanggal perolehan atau akuisisi.
- b. *Cost* penggantian terkini yaitu harga tunai yang akan dibayarkan sekarang untuk membeli atau mengganti jenis barang atau jasa yang sama yang tidak didiskontokan yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban.
- c. Nilai pasar terkini yaitu harga tunai ekuivalen yang dapat diperoleh dengan menjual suatu aktiva dan likuidasi yang dilakukan secara terarah.
- d. Nilai bersih yang dapat direalisasi yaitu jumlah kas yang diharapkan diterima atau dibayarkan dari hasil pertukaran aktiva atau kewajiban dalam kegiatan normal perusahaan.
- e. Nilai sekarang yang didiskontokan yaitu aktiva yang dinyatakan sebesar arus kas masuk bersih dimasa depan yang didiskontokan ke nilai dari pos yang diharapkan hasil dalam pelaksanaan usaha normal kewajiban dinyatakan ke nilai sekarang yang diharapkan akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dalam pelaksanaan usaha.

3. Penyajian Pendapatan

Penyajian dalam akuntansi merupakan proses penempatan suatu akun secara terstruktur pada laporan keuangan. Penempatan akun secara struktur berarti akun aset disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan sifat likuidnya. Aset yang lebih cepat likuidnya disajikan terlebih dahulu sehingga penyajiannya dimulai dari aset lancar kemudian diikuti dengan aset tetap. Menurut PSAP Nomor 12, penyajian pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan pada laporan operasional. Rincian tentang masing-masing jenis pendapatan lebih lanjut

diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Pengungkapan Pendapatan

Pengungkapan pendapatan yaitu penyediaan informasi mengenai pendapatan yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan badan layanan umum, pendapatan diungkapkan:

- a. Pendapatan disajikan secara terpisah pada laporan keuangan untuk setiap jenis pendapatan.
- b. Rincian jenis pendapatan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

2.2.5 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Berdasarkan Pada Peraturan Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 8 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis akuntansi yang diterapkan dalam APBD.

Standar akuntansi pemerintahan mengatur pada basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah, yaitu basis kas untuk pengakuan belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca. Basis akuntansi tersebut dikenal dengan istilah kas menuju akrual (*cash toward accrual*). Secara umum basis kas pada akuntansi telah lama ditinggalkan oleh para penyelenggara laporan keuangan dan telah beralih ke basis akrual.

Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah :

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran BLU/BLUD dapat menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/definis-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca digambarkan pada posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) disajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambahkan ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggara pemerintah dalam satu periode pelaporan.

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas BLU/BLUD menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLU/BLUD.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menggambarkan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan disajikan dalam rincian dan penjelasan lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas.

2.2.6 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP 12)

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 12 atau PSAP 12 adalah pernyataan standar akuntansi pemerintah tentang pendapatan laporan operasional. PSAP 12 terdapat dalam lampiran peraturan Nomor 71 Tahun 2010. Tujuan PSAP 12 adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan operasional untuk Pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Tujuan pelaporan operasi adalah memberikan informasi kegiatan-kegiatan operasional keuangan yang terceminikan dalam- LO, beban, dan surplus/defisit

operasional dari suatu entitas pelaporan.

Ruang lingkup PSAP 12 diterapkan dalam penyajian Laporan Operasional. PSAP 12 berlaku untuk setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam menyusun laporan operasional yang menggambarkan pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dalam suatu periode pelaporan tertentu, tidak termasuk perusahaan negara/daerah. Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan, sehingga Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan :

1. Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas
2. Kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi
3. Yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif
4. Mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan –LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Laporan Operasional dijelaskan lebih lanjut dalam catatan atas laporan keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan

fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Dalam laporan operasional harus diidentifikasi secara jelas dan jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan informasi berikut:

1. Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya
2. Cakupan entitas pelaporan
3. Mata uang pelaporan
4. Satuan angka yang digunakan

Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:

1. Pendapatan-LO
2. Beban
3. Surplus/Defisit dari operasi
4. Kegiatan non operasional
5. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa
6. Pos Luar Biasa
7. Surplus/Defisit-LO

Dalam Laporan Operasional ditambahkan pos, judul, dan sub jumlah lainnya apabila diwajibkan oleh PSAP, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan Laporan Operasional secara wajar.

2.2.7 Pengertian Rumah Sakit dan Jenis-Jenis Rumah Sakit

1. Pengertian Rumah Sakit

Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat darurat (undang-undang) republik indonesia nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

2. Jenis-Jenis Rumah Sakit

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, rumah sakit dibagi berdasarkan jenis pelayanan dan pengolaannya. berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, rumah sakit dikategorikan:

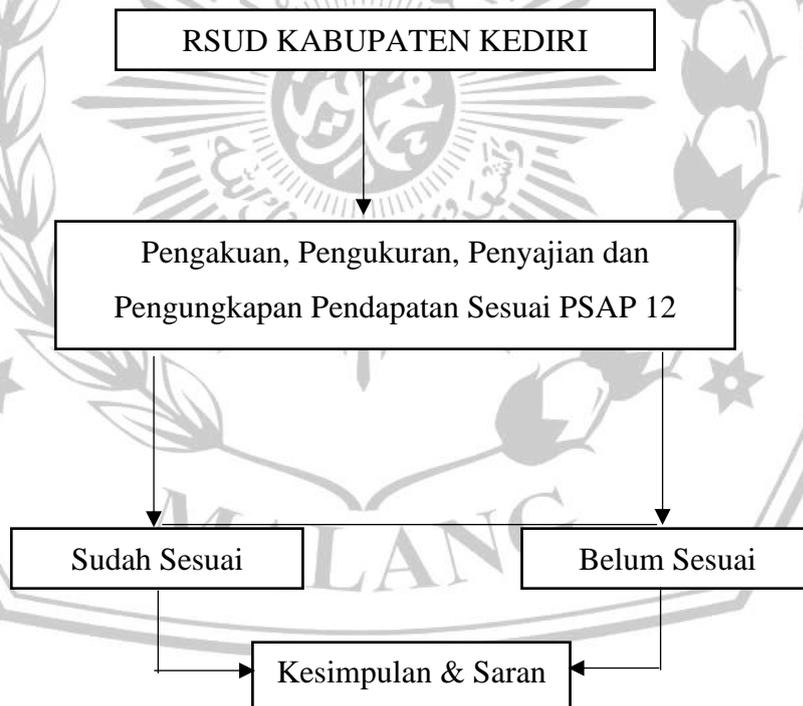
1. Rumah sakit umum yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
2. Rumah sakit khusus, yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya.

Berdasarkan pengelolaannya rumah sakit dapat dibagi menjadi:

1. Rumah sakit publik, yaitu rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah dan badan hukum yang bersifat nirlaba.
2. Rumah sakit privat, yaitu rumah sakit yang dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk perseroan terbatas atau persen.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka konseptual

Berdasarkan kerangka konseptual diatas, SAP 12 tentang pendapatan adalah standar yang digunakan sebagai dasar pengaturan pengakuan, pengukuran,

penyajian, dan pengungkapan pendapatan di instansi pemerintah, termasuk rumah sakit daerah. Kerangka ini diawali dengan SAP No. 12 sebagai landasan normatif untuk menganalisis pengelolaan pendapatan di RSUD Kabupaten Kediri. SAP 12 mengatur bagaimana pendapatan diakui (kapan pendapatan dianggap telah terjadi), diukur (nilai pendapatan yang dicatat), disajikan (bagaimana pendapatan ditampilkan dalam laporan keuangan), dan diungkapkan (informasi pendapatan yang wajib diungkapkan).

Setelah menganalisis pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pendapatan di RSUD Kabupaten Kediri, peneliti akan mengevaluasi sejauh mana implementasi SAP No. 12 telah berjalan sesuai dengan standar. Kemudian peneliti akan menyimpulkan apakah pengelolaan pendapatan di RSUD Kabupaten Kediri sudah sesuai atau belum dengan SAP 12.

